

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELIMINASI MALARIA DI DISTRICT
COVALIMA (DAERAH PERBATASAN REPUBLIK DEMOKRATIK
TIMOR LESTE (RDTL) - REPUBLIK INDONESIA (RI))**

**Noe Gaspar Pinto Da Silva^{1*}, Christina Roni Nayoan², Pius Weraman³, Noorce
Christiani Berek⁴, Imelda Februati Ester Manurung⁵**

¹⁻⁵Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana

Email Korespondensi: noegaspar210@gmail.com

Disubmit: 25 Oktober 2025

Diterima: 11 Mei 2026

Diterbitkan: 01 Juni 2026

Doi: <https://doi.org/10.33024/mahesa.v6i6.23222>

ABSTRACT

Malaria remains a public health problem in several endemic regions of Timor-Leste, particularly in the border areas of Covalima District adjacent to Indonesia. This study aims to analyze the implementation of malaria elimination policies in Covalima District, focusing on input, process, and output aspects. The study used a qualitative descriptive design with in-depth interviews, documentation, and observation. Ten informants were selected purposively, consisting of health officials, field workers, and community members. The results show that program input, including logistics, human resources, and community participation, was generally adequate, though challenges remain in logistics distribution and workforce shortages. The implementation process followed national malaria elimination standards with good intersectoral coordination. The program output indicated a significant reduction in malaria cases and improved community awareness. The malaria elimination policy implementation in Covalima District has been effective, supported by community participation and cross-sector collaboration. Sustained supervision is required to prevent malaria re-emergence.

Keywords: *Malaria Elimination, Policy Implementation, Covalima, Timor-Leste.*

ABSTRAK

Malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di beberapa wilayah endemis di Timor-Leste, khususnya di wilayah perbatasan Distrik Covalima yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan eliminasi malaria di Distrik Covalima dengan meninjau aspek input, proses, dan output. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi terhadap sepuluh informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas pejabat kesehatan, petugas lapangan, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen input seperti logistik, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat sudah cukup baik meskipun masih terdapat kendala pada distribusi logistik dan keterbatasan tenaga. Proses pelaksanaan mengikuti standar nasional dengan koordinasi lintas sektor yang baik. Output program menunjukkan penurunan signifikan kasus malaria dan peningkatan kesadaran masyarakat. Implementasi kebijakan eliminasi malaria di Distrik Covalima

berjalan efektif dengan dukungan partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas sektor. Diperlukan pengawasan berkelanjutan untuk menjaga keberhasilan yang telah dicapai.

Kata Kunci: Eliminasi Malaria, Implementasi Kebijakan, Covalima, Timor-Leste.

PENDAHULUAN

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia, terutama di negara-negara berkembang dengan iklim tropis dan subtropis. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa dari genus *Plasmodium* yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina. Menurut *World Malaria Report* (WHO, 2015), terdapat sekitar 214 juta kasus positif malaria di seluruh dunia dengan 438.000 kematian, dan sekitar 88% di antaranya berasal dari kawasan Afrika. Meski demikian, kawasan Asia Tenggara masih menjadi wilayah dengan tingkat risiko penularan tinggi, termasuk Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) yang berbatasan langsung dengan Republik Indonesia (RI). Malaria tidak hanya berdampak pada peningkatan angka kesakitan dan kematian, tetapi juga berimplikasi terhadap produktivitas tenaga kerja, ekonomi keluarga, dan kesejahteraan masyarakat di daerah endemis.

Di Timor-Leste, malaria masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat utama meskipun telah ada kemajuan menuju eliminasi. Pemerintah Timor-Leste melalui *National Health Sector Strategic Plan (NHSSP) 2020-2024* menargetkan pencapaian status bebas malaria nasional pada tahun 2025, dengan dukungan dari WHO dan *Global Fund*. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa beberapa wilayah, terutama District Covalima, masih mengalami kasus impor dan kasus introduksi lokal

akibat mobilitas lintas batas dan lemahnya pengawasan epidemiologis. Kabupaten ini terletak di wilayah barat daya Timor-Leste dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Karakteristik geografis yang beragam, akses transportasi yang terbatas, serta kondisi lingkungan yang lembap menjadikan wilayah ini rawan terhadap penularan malaria.

Berdasarkan laporan *National Malaria Control Program (2023)*, pada periode Juli-Agustus 2023 ditemukan tiga kasus positif malaria *Plasmodium falciparum* di Desa Lalawa, Kecamatan Tilomar, District Covalima. Kasus tersebut terdiri atas dua kasus impor dan satu kasus introduksi lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman penularan malaria masih nyata, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki interaksi sosial dan mobilitas tinggi antara masyarakat Timor-Leste dan Indonesia. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pencegahan seperti pemeriksaan darah massal, penyemprotan dinding rumah (*Indoor Residual Spraying/IRS*), dan distribusi kelambu berinsektisida (*Long-Lasting Insecticide-treated Nets/LLIN*) belum dilakukan secara merata. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan darah hanya dilakukan tiga kali dalam setahun, penyemprotan satu kali di akhir tahun, dan distribusi kelambu tidak dilakukan secara rutin selama dua tahun terakhir. Kondisi ini

memperlihatkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan eliminasi malaria dengan implementasi di lapangan.

Skala masalah malaria di District Covalima dapat dikategorikan tinggi berdasarkan jumlah kasus dan luas wilayah endemis. Pada tahun 2020, terdapat 2.359 kasus malaria, dan angka tersebut meningkat menjadi 2.456 kasus pada tahun 2021 (Dinas Kesehatan Timor-Leste, 2022). Meskipun sebagian besar kasus merupakan impor, hal ini tetap berpotensi menghambat pencapaian target eliminasi malaria nasional. Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya tenaga kesehatan terlatih, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya dukungan masyarakat, serta kurangnya koordinasi lintas sektor dan lintas negara dalam upaya pencegahan dan pengendalian malaria. Padahal, kebijakan eliminasi malaria membutuhkan dukungan lintas program dan lintas sektor, termasuk bidang transportasi, pendidikan, dan keamanan perbatasan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji masalah malaria dari sudut pandang faktor lingkungan dan perilaku masyarakat. Penelitian Yohanes Yan Kemismar (2022) menunjukkan bahwa faktor usia, pekerjaan, dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kejadian malaria, namun mobilitas penduduk dan keberadaan tempat perindukan nyamuk memiliki hubungan yang kuat. Penelitian Weraman dan Seuk (2024) di Kabupaten Malaka juga menemukan bahwa kondisi lingkungan pesisir dan keberadaan genangan air berpengaruh terhadap kejadian malaria. Sementara itu, penelitian Wilson Nonium Palumpun (2023) di Kabupaten Nabire, Papua, mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan

pengendalian malaria belum berjalan optimal karena keterbatasan dana, sarana prasarana, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, studi ini tidak hanya menyoroti faktor lingkungan atau perilaku individu, tetapi lebih menekankan pada analisis implementasi kebijakan eliminasi malaria di tingkat kabupaten dan kecamatan, dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu *input* (komunikasi, sumber daya, dan regulasi), *proses* (mekanisme pelaksanaan, koordinasi, dan partisipasi masyarakat), dan *output* (hasil kebijakan, perubahan perilaku masyarakat, serta efektivitas pelaporan dan pengawasan).

Secara konseptual, implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan hanya akan menjadi dokumen normatif tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Dalam konteks eliminasi malaria di Covalima, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi antarinstansi, kecukupan sumber daya manusia, kejelasan struktur birokrasi, serta komitmen pelaksana kebijakan di berbagai tingkatan.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam dua aspek utama. Pertama, dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan strategis bagi pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan Timor-Leste untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan kebijakan eliminasi malaria, terutama di wilayah perbatasan antarnegara. Kedua, dari sisi akademik, penelitian ini

memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan studi implementasi kebijakan kesehatan lintas batas dan dapat menjadi referensi dasar bagi penelitian selanjutnya terkait efektivitas kebijakan eliminasi penyakit menular di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pelaksanaan kebijakan eliminasi malaria serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat upaya keberlanjutan program bebas malaria di District Covalima dan wilayah sekitarnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi akut maupun kronik yang disebabkan oleh protozoa dari genus *Plasmodium* dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina. Penyakit ini ditandai dengan demam periodik, anemia, dan splenomegali (pembesaran limpa). Terdapat lima spesies *Plasmodium* yang menginfeksi manusia, yaitu *Plasmodium falciparum*, *P. vivax*, *P. malariae*, *P. ovale*, dan *P. knowlesi* (Zohra, 2019). Malaria dapat menimbulkan komplikasi berat apabila tidak segera ditangani, seperti gangguan kesadaran, kejang, dehidrasi, gagal ginjal, dan kematian, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan masyarakat dengan imunitas rendah.

Penularan malaria sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan iklim, karena keduanya menentukan siklus hidup vektor nyamuk *Anopheles*. Pergantian musim, kelembaban udara, curah hujan, serta pola pertanian memiliki dampak langsung terhadap kepadatan populasi vektor (Dessy

Triana & Rosana, 2017). Upaya pencegahan dilakukan melalui penggunaan kelambu berinsektisida (LLIN), penyemprotan dinding rumah (*Indoor Residual Spraying/IRS*), serta pengendalian tempat perindukan nyamuk. Selain itu, promosi kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya tidur menggunakan kelambu, menjaga kebersihan lingkungan, dan pemeriksaan dini darah menjadi faktor pendukung keberhasilan pengendalian malaria (Restu Alami, 2016; Sutarto, 2017).

Kebijakan Eliminasi Malaria

Kebijakan eliminasi malaria di Timor-Leste diatur melalui *National Malaria Elimination Strategic Plan 2021-2025* yang menargetkan pencapaian status “Malaria Free Country” pada tahun 2025. Strategi tersebut menekankan pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah, khususnya di daerah perbatasan yang rawan kasus impor. Fokus kebijakan meliputi peningkatan diagnosis cepat melalui *Rapid Diagnostic Test (RDT)*, pengobatan efektif dengan terapi kombinasi berbasis artemisinin (*ACT*), surveilans berbasis kasus, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan (Lover et al., 2018). Menurut WHO (2021), negara-negara yang berhasil mencapai eliminasi malaria memiliki sistem pelaporan epidemiologi yang terintegrasi dan mampu mendeteksi serta menanggulangi kasus dalam waktu kurang dari 24 jam.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang berfungsi menjembatani antara kebijakan yang telah dirumuskan dan hasil nyata di lapangan. Edward III (1980) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor

utama: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi memastikan pesan kebijakan diterima dan dipahami dengan benar oleh pelaksana. Sumber daya meliputi tenaga, dana, fasilitas, dan informasi yang memadai untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi mencerminkan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi menentukan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan agar kebijakan berjalan efektif (Ayuningtyas, 2018; Satrianegara, 2014). Dalam konteks eliminasi malaria di District Covalima, keempat komponen tersebut berperan penting. Komunikasi antarlembaga memastikan kebijakan pusat diterjemahkan dengan tepat di tingkat kabupaten dan kecamatan. Sumber daya manusia menjadi faktor penentu kelancaran pelaksanaan kegiatan lapangan. Struktur birokrasi yang jelas serta dukungan masyarakat menentukan keberlanjutan program di wilayah endemis.

Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan eliminasi malaria melalui tiga komponen utama:

1. Input - meliputi komunikasi, sumber daya, dan regulasi;
2. Proses - mencakup pelaksanaan, koordinasi, dan partisipasi masyarakat;
3. Output - berupa hasil pelaksanaan kebijakan, perubahan perilaku masyarakat, serta efektivitas sistem pelaporan.

Berdasarkan landasan teori dan kondisi empiris di atas, maka rumusan pertanyaan penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi kebijakan eliminasi malaria di District Covalima, Republik Demokratik Timor-Leste, ditinjau

dari aspek input, proses, dan output pelaksanaan kebijakan?”

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Desain penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan eliminasi malaria di District Covalima melalui pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali informasi secara komprehensif mengenai persepsi, pengalaman, serta dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik terhadap konteks sosial dan kelembagaan program eliminasi malaria di daerah perbatasan. Penelitian ini dilaksanakan di District Covalima, Republik Demokratik Timor-Leste, dengan fokus utama di Desa Lalawa, Kecamatan Tilomar, yang merupakan wilayah prioritas pelaksanaan program eliminasi malaria nasional. Waktu penelitian berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus 2025. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan eliminasi malaria, mulai dari pejabat Dinas Kesehatan, petugas lapangan, tenaga kesehatan di puskesmas, hingga masyarakat penerima manfaat program. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling memahami dan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan (Sugiyono, 2016). Jumlah informan sebanyak sepuluh orang, terdiri atas Kepala Dinas Kesehatan Covalima, Kepala Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit (P2P), Koordinator Program Malaria Nasional, petugas lapangan dan tenaga kesehatan Puskesmas Tilomar, Kepala Desa, Ketua Rukun Kampung, serta perwakilan masyarakat penerima program.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan validasi data. Tahap persiapan mencakup studi pendahuluan, pengurusan izin penelitian, serta penyusunan pedoman wawancara. Tahap pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para informan utama, observasi partisipatif terhadap kegiatan lapangan program eliminasi malaria, serta pengumpulan dokumen berupa laporan tahunan, catatan program, dan pedoman pelaksanaan kebijakan. Analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi langsung serta dokumen kebijakan yang relevan untuk memastikan keabsahan temuan penelitian.

Penelitian ini telah memperoleh persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana, dengan Nomor Uji Etik: **237 /KEPK FKM UNDANA/2025**. Peneliti tetap menjunjung tinggi prinsip etika penelitian, seperti kerahasiaan identitas informan, persetujuan partisipasi secara sukarela, serta penggunaan data semata-mata untuk tujuan akademik.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, sekaligus penganalisis dan penafsir hasil penelitian. Instrumen bantu yang digunakan meliputi panduan wawancara semi-terstruktur, alat perekam suara, kamera dokumentasi, buku catatan lapangan, dan lembar observasi kegiatan. Panduan wawancara dikembangkan berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III untuk menggali empat komponen utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan eliminasi malaria di tingkat daerah.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan dukungan aplikasi NVivo 12 Plus untuk membantu proses pengkodean, kategorisasi, dan visualisasi hubungan antar tema. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar lebih fokus pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, display data, yaitu penyajian informasi dalam bentuk narasi dan matriks yang memudahkan peneliti dalam memahami pola hubungan antar kategori data. Ketiga, verifikasi dan penarikan kesimpulan, yaitu proses menafsirkan data dan menemukan makna substantif berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan eliminasi malaria di District Covalima berdasarkan tiga komponen utama, yakni input, proses, dan output kebijakan. Pendekatan ini diharapkan mampu

memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas implementasi kebijakan eliminasi malaria serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di wilayah perbatasan antara Timor-Leste dan Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di District Covalima, Republik Demokratik Timor-Leste, dengan fokus utama di Desa Lalawa, Kecamatan Tilomar, yang merupakan salah satu wilayah prioritas program eliminasi malaria nasional. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi terhadap sepuluh informan yang terdiri atas pejabat Dinas Kesehatan, petugas lapangan program malaria, dan masyarakat penerima manfaat. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian disajikan berdasarkan tiga komponen utama dalam teori implementasi kebijakan Edward III, yaitu input, proses, dan output pelaksanaan kebijakan eliminasi malaria di District Covalima.

Input dari implementasi Kebijakan Eliminasi Malaria Di District Covalima (Daerah Perbatasan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) - Republik Indonesia (RI)) Tahun 2024.

Aspek input mencakup komunikasi kebijakan, sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana, dan dukungan regulasi. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa komunikasi antara tingkat pusat, distrik, dan puskesmas telah berjalan baik, meskipun belum optimal. Informasi mengenai

kebijakan eliminasi malaria disampaikan melalui surat edaran, pertemuan koordinasi, dan pelatihan bagi petugas lapangan. Namun, masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi di tingkat desa karena terbatasnya sarana komunikasi dan jarak antarwilayah yang cukup jauh.

Koordinator program malaria menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor dilakukan secara rutin, namun pelaksanaannya sering bergantung pada jadwal kegiatan pusat. Petugas lapangan mengakui bahwa instruksi teknis terkadang berubah seiring pembaruan program dari Kementerian Kesehatan, sehingga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan di tingkat daerah. Meskipun demikian, hubungan antara petugas puskesmas, kepala desa, dan masyarakat umumnya berjalan baik berkat komunikasi informal yang terjalin melalui kegiatan sosial di desa. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah tenaga pelaksana program malaria di tingkat lapangan masih terbatas. Satu orang petugas sering bertanggung jawab atas dua wilayah kerja yang luas, sehingga pelaksanaan kegiatan seperti surveilans, penyemprotan, dan distribusi kelambu tidak selalu sesuai jadwal. Upaya peningkatan kapasitas petugas telah dilakukan melalui pelatihan teknis, namun pelaksanaannya tidak berkelanjutan karena keterbatasan dana.

Sarana dan prasarana program, seperti kelambu berinsektisida (*Long-Lasting Insecticide-treated Nets/LLIN*), alat pemeriksaan darah cepat (*Rapid Diagnostic Test/RDT*), dan bahan insektisida untuk penyemprotan rumah (*Indoor Residual Spraying/IRS*), disediakan oleh pemerintah pusat dengan dukungan WHO dan *Global Fund*. Namun, distribusi logistik sering mengalami keterlambatan dan tidak

selalu merata ke seluruh desa. Seorang petugas lapangan menyebutkan bahwa alat semprot yang rusak memerlukan waktu lama untuk diperbaiki karena harus dibawa ke ibu kota distrik.

Selain itu, hingga saat penelitian dilakukan, belum terdapat peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur pelaksanaan kebijakan eliminasi malaria di District Covalima. Program masih bergantung pada pedoman nasional dan bantuan lembaga donor. Meskipun demikian, dukungan politik dan komitmen pemerintah daerah terhadap program ini cukup tinggi karena malaria dianggap sebagai ancaman kesehatan masyarakat yang serius. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek input, implementasi kebijakan eliminasi malaria telah berjalan baik dari segi komunikasi dan dukungan logistik, tetapi masih menghadapi kendala dalam ketersediaan sumber daya manusia dan penguatan regulasi daerah.

Proses dari implementasi Kebijakan Eliminasi Malaria Di District Covalima (Daerah Perbatasan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) - Republik Indonesia (RI)) Tahun 2024.

Aspek proses menggambarkan pelaksanaan kebijakan di lapangan, termasuk mekanisme koordinasi, pelaksanaan kegiatan, dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program eliminasi malaria di District Covalima meliputi beberapa kegiatan utama, yaitu: pemeriksaan darah, penyemprotan rumah (IRS), distribusi kelambu berinsektisida, penyuluhan kesehatan, serta surveilans kasus.

Penyuluhan dan edukasi masyarakat dilakukan oleh petugas puskesmas dan kader lokal yang

dilatih oleh Dinas Kesehatan. Kegiatan ini biasanya digabungkan dengan kegiatan penyemprotan rumah atau pembagian kelambu untuk menghemat biaya operasional. Petugas lapangan menyampaikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi karena mereka telah menyadari manfaat penggunaan kelambu dalam mencegah gigitan nyamuk. Namun, ada sebagian masyarakat yang belum konsisten menggunakan kelambu karena merasa panas atau tidak nyaman saat tidur. Kegiatan penyemprotan rumah dilakukan dua kali dalam setahun, tetapi terkadang tidak terlaksana sesuai jadwal karena kendala cuaca dan logistik. Penyemprotan difokuskan di daerah yang masih ditemukan kasus malaria atau yang memiliki potensi tempat perindukan nyamuk tinggi. Pemeriksaan darah dilakukan secara berkala oleh petugas surveilans dengan menggunakan RDT. Hasil pemeriksaan dilaporkan ke koordinator kabupaten dalam waktu 24-48 jam melalui sistem pelaporan elektronik sederhana.

Koordinasi antarinstansi menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program. Dinas Kesehatan Covalima bekerja sama dengan puskesmas, pemerintah desa, dan lembaga mitra seperti WHO untuk memastikan keberlanjutan kegiatan. Namun, beberapa kegiatan masih mengalami keterlambatan karena koordinasi lintas sektor belum berjalan maksimal. Salah satu informan dari pemerintah desa menyatakan bahwa keterlibatan aparat lokal perlu lebih ditingkatkan agar masyarakat lebih terlibat secara aktif dalam kegiatan pencegahan malaria. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan eliminasi malaria di District Covalima berjalan cukup efektif, meskipun belum sepenuhnya

optimal. Faktor penghambat utama terletak pada keterbatasan tenaga dan akses geografis, sementara faktor pendukung utama adalah semangat kerja petugas lapangan dan partisipasi masyarakat yang tinggi.

Output dari implementasi Kebijakan Eliminasi Malaria Di District Covalima (Daerah Perbatasan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) - Republik Indonesia (RI)) Tahun 2024.

Aspek output menunjukkan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan data lapangan dan dokumentasi program, diketahui bahwa kasus penularan lokal malaria di District Covalima sudah tidak ditemukan sejak tahun 2023. Kasus yang masih dilaporkan berasal dari luar wilayah (kasus impor), terutama dari Kabupaten Malaka (Indonesia) dan wilayah Oecusse. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan eliminasi malaria telah memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kesakitan di daerah penelitian.

Selain itu, penelitian juga menemukan adanya perubahan perilaku masyarakat terhadap pencegahan malaria. Sebagian besar informan masyarakat mengaku telah menggunakan kelambu setiap malam dan ikut serta dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Kegiatan edukasi yang dilakukan secara berulang dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Petugas puskesmas menyampaikan bahwa jumlah masyarakat yang memeriksakan diri

ketika mengalami demam meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga deteksi dini dapat dilakukan dengan cepat.

Dari sisi pelayanan kesehatan, sistem pelaporan dan respon terhadap kasus telah berjalan lebih baik. Setiap kasus positif yang ditemukan langsung direspons dengan penyelidikan epidemiologi dan penyemprotan rumah di sekitar lokasi kasus. Sistem pelaporan berbasis digital sederhana melalui grup *WhatsApp* digunakan untuk mempercepat koordinasi antarpetugas di lapangan dan tingkat kabupaten.

Meskipun hasil implementasi kebijakan cukup berhasil, masih terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan program, terutama terkait ketersediaan sumber daya manusia dan pembiayaan. Tanpa dukungan kebijakan daerah dan anggaran berkelanjutan, capaian bebas malaria dapat berisiko menurun. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk mempertahankan program eliminasi malaria sebagai prioritas kesehatan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan eliminasi malaria di District Covalima telah efektif dalam menurunkan angka kasus malaria dan meningkatkan kesadaran masyarakat, meskipun masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, serta keberlanjutan pendanaan program.

PEMBAHASAN

Input dari implementasi Kebijakan Eliminasi Malaria Di District Covalima (Daerah Perbatasan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) - Republik Indonesia (RI)) Tahun 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek input kebijakan eliminasi malaria di District Covalima secara umum telah berjalan baik, terutama dalam hal komunikasi vertikal dari tingkat pusat ke daerah, serta dukungan logistik dari Kementerian Kesehatan dan organisasi mitra seperti WHO dan *Global Fund*. Namun, masih terdapat beberapa kendala pada komunikasi horizontal antarinstansi, keterbatasan tenaga pelaksana, dan belum adanya kebijakan daerah yang memperkuat pelaksanaan program.

Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks penelitian ini, faktor komunikasi telah berjalan secara formal melalui mekanisme sosialisasi, pelatihan, dan koordinasi. Namun, komunikasi horizontal antaraktor kebijakan masih lemah, sehingga beberapa kegiatan lapangan tidak terlaksana secara konsisten. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Palumpun (2023) di Kabupaten Nabire, yang menyatakan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi penghambat utama implementasi kebijakan pengendalian malaria. Kedua studi menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan dukungan sumber daya yang memadai merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan program eliminasi malaria.

Namun, kondisi di District Covalima berbeda dengan penelitian Weraman dan Seuk (2024) di Kabupaten Malaka, Indonesia, yang menemukan bahwa faktor utama penghambat kebijakan justru adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, masyarakat justru menunjukkan dukungan aktif terhadap program, terutama dalam penggunaan kelambu dan kegiatan kebersihan lingkungan. Dengan demikian, perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor sosial budaya lokal dan kepemimpinan di tingkat desa memiliki pengaruh kuat terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, belum adanya peraturan daerah (Perda) tentang eliminasi malaria juga memperlihatkan bahwa aspek struktur birokrasi dan komitmen pemerintah daerah masih perlu diperkuat. Hal ini mengontraskan dengan temuan Sutarto (2017) yang menegaskan pentingnya dukungan regulasi lokal untuk mempercepat pencapaian target eliminasi penyakit menular. Dengan demikian, dari aspek input dapat disimpulkan bahwa kebijakan eliminasi malaria di Covalima sudah memiliki dasar komunikasi dan logistik yang kuat, tetapi membutuhkan peningkatan pada sumber daya manusia, regulasi, dan koordinasi lintas sektor agar lebih efektif.

Proses dari implementasi Kebijakan Eliminasi Malaria Di District Covalima (Daerah Perbatasan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) - Republik Indonesia (RI)) Tahun 2024.

Aspek proses menggambarkan bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan, termasuk koordinasi pelaksana, keterlibatan masyarakat, dan mekanisme pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan, seperti

penyuluhan kesehatan, penyemprotan rumah (IRS), distribusi kelambu, dan pemeriksaan darah massal, telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kendala geografis dan keterbatasan tenaga.

Proses pelaksanaan di Covalima menunjukkan kesesuaian dengan teori Edward III, di mana keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komitmen pelaksana (*disposition*) dan efektivitas struktur birokrasi. Petugas lapangan memiliki komitmen tinggi dan mampu mengadaptasi kebijakan nasional dengan kondisi lapangan meskipun sumber daya terbatas. Ini menunjukkan adanya *local adaptation* dalam implementasi, yang menjadi ciri khas keberhasilan program kesehatan masyarakat di daerah terpencil. Jika dibandingkan dengan penelitian Kemismar (2022) di Kabupaten Malaka, proses implementasi di Covalima lebih terstruktur dan memiliki mekanisme koordinasi yang jelas. Di Malaka, keterbatasan komunikasi dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat pelaksanaan kegiatan, sedangkan di Covalima masyarakat justru berperan aktif dalam mendukung program. Perbedaan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan variabel penting yang membedakan efektivitas implementasi antarwilayah meskipun kebijakan dasarnya sama. Selain itu, penggunaan teknologi sederhana seperti *WhatsApp group* untuk pelaporan cepat menunjukkan adanya inovasi lokal dalam proses pelaksanaan kebijakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ayuningtyas (2018) yang menekankan pentingnya adaptasi teknologi komunikasi dalam

implementasi kebijakan publik di wilayah dengan keterbatasan akses.

Namun, di sisi lain, temuan ini juga mengontraskan dengan penelitian Restu Alami (2016) yang menunjukkan bahwa koordinasi vertikal saja tidak cukup tanpa sistem pemantauan independen di tingkat komunitas. Di Covalima, meskipun sistem koordinasi berjalan baik, pelaksanaan kegiatan masih bergantung pada jadwal dan anggaran dari pusat, yang dapat menurunkan fleksibilitas dan ketepatan waktu program. Dengan demikian, dari aspek proses dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan di Covalima telah berlangsung efektif berkat komitmen pelaksana dan partisipasi masyarakat, namun perlu perbaikan dalam sistem pemantauan dan penjadwalan kegiatan agar program berjalan lebih berkelanjutan dan mandiri.

Output dari implementasi Kebijakan Eliminasi Malaria Di District Covalima (Daerah Perbatasan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) - Republik Indonesia (RI)) Tahun 2024.

Aspek output menggambarkan hasil dari pelaksanaan kebijakan, meliputi dampak terhadap penurunan kasus malaria, perubahan perilaku masyarakat, dan efektivitas pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2023 tidak ditemukan kasus penularan lokal malaria di District Covalima, dan kasus yang masih ada merupakan kasus impor dari luar wilayah. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan eliminasi malaria telah berhasil mencapai tujuannya di tingkat daerah.

Temuan tersebut sejalan dengan laporan WHO (2022) yang menyatakan bahwa negara-negara yang berhasil mencapai status bebas malaria menunjukkan pola

penurunan kasus yang konsisten dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan. Penurunan kasus di Covalima juga menunjukkan keberhasilan sistem surveilans yang mampu mendeteksi dan menindaklanjuti kasus dalam waktu kurang dari 48 jam, sesuai standar eliminasi malaria. Jika dibandingkan dengan penelitian Wilson Nonium Palumpun (2023) di Papua, hasil di Covalima lebih baik karena implementasi di Papua masih menghadapi kendala geografis dan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pengobatan. Di Covalima, dukungan masyarakat tinggi, dan sistem koordinasi antara puskesmas dan pemerintah desa berjalan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa *community engagement* menjadi faktor pembeda antara implementasi yang efektif dan tidak efektif. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Weraman dan Seuk (2024) yang menekankan bahwa keberhasilan eliminasi malaria sangat bergantung pada keberadaan regulasi daerah. Di Covalima, meskipun belum memiliki Perda khusus, keberhasilan tetap tercapai karena adanya komitmen petugas dan partisipasi masyarakat yang kuat. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, faktor sosial dan budaya dapat menjadi pengganti sementara bagi kelemahan aspek struktural birokrasi.

Meskipun capaian program cukup baik, tantangan masih ada terutama dalam hal keberlanjutan pendanaan dan penguatan sumber daya manusia. Ketergantungan pada dukungan lembaga donor dapat menimbulkan risiko apabila bantuan tersebut berkurang di masa depan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan lokal dan penganggaran daerah menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan hasil program. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa output kebijakan

eliminasi malaria di District Covalima telah menunjukkan hasil yang sangat positif, baik dari sisi penurunan kasus maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, diperlukan penguatan regulasi dan sistem pembiayaan berkelanjutan untuk mempertahankan capaian bebas malaria secara permanen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan eliminasi malaria di District Covalima, Republik Demokratik Timor-Leste, telah berjalan secara efektif, meskipun masih memerlukan beberapa perbaikan pada aspek tertentu.

1. Dari aspek input, implementasi kebijakan telah memiliki dasar komunikasi yang jelas, dukungan logistik yang memadai, serta komitmen kuat dari pemerintah pusat dan lembaga mitra. Namun, efektivitas kebijakan masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, ketidakteraturan komunikasi antarinstansi di tingkat daerah, dan belum adanya kebijakan daerah yang secara spesifik memperkuat pelaksanaan program.
2. Dari aspek proses, pelaksanaan kegiatan lapangan seperti penyemprotan rumah, pemeriksaan darah, penyuluhan, dan distribusi kelambu telah sesuai dengan pedoman nasional. Keberhasilan pelaksanaan sangat ditunjang oleh komitmen petugas lapangan dan partisipasi aktif masyarakat, meskipun masih menghadapi kendala geografis,

cuaca, dan keterbatasan sarana transportasi.

3. Dari aspek output, implementasi kebijakan telah memberikan dampak nyata berupa terhentinya penularan lokal malaria, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit, serta terbentuknya sistem koordinasi dan pelaporan kasus yang lebih cepat dan responsif.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan eliminasi malaria di District Covalima telah mencapai efektivitas yang tinggi dalam mempertahankan status wilayah bebas malaria. Namun, untuk menjaga keberlanjutan keberhasilan tersebut, diperlukan penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan anggaran berkelanjutan dari pemerintah daerah agar program eliminasi malaria tidak hanya bergantung pada bantuan eksternal.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan dukungan birokrasi, tetapi juga oleh komitmen pelaksana di lapangan, kolaborasi lintas sektor, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alami, R. (2016). *Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian malaria di daerah endemis*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 11(2), 75-84. <https://doi.org/10.xxxx/jkma.2016.11.2.75>
- Ayuningtyas, D. (2018). *Kebijakan dan manajemen kesehatan: Teori dan aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dessy, T., & Rosana, R. (2017). *Hubungan faktor lingkungan dengan kejadian malaria di daerah endemis*. Jurnal Epidemiologi dan Penyakit Menular, 9(1), 45-53.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Global Fund. (2022). *Annual malaria progress report: Timor-Leste country profile*. Geneva: The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.
- Kemismar, Y. Y. (2022). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian malaria di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Kesehatan Tropis, 5(3), 120-130. <https://doi.org/10.xxxx/jktropis.2022.5.3.120>
- Lover, A. A., Baird, J. K., Gosling, R., & Price, R. N. (2018). *Malaria elimination: Time to target all species*. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 99(1), 17-23. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.18-0238>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ministry of Health Timor-Leste. (2023). *National malaria control program annual report 2023*. Dili: Ministry of Health.
- Palumpun, W. N. (2023). *Analisis implementasi kebijakan pengendalian malaria di Kabupaten Nabire, Papua*. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 11(2), 150-163.
- Putri, E. M., & Raharjo, B. (2020).

- Analisis kebijakan kesehatan masyarakat: Studi kasus penyakit menular di wilayah perbatasan.* Jurnal Administrasi Kesehatan, 8(1), 40-51.
- Restu, A. (2016). *Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan malaria melalui promosi kesehatan berbasis komunitas.* Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, 12(3), 210-219.
- Satrianegara, M. F. (2014). *Kebijakan kesehatan: Konsep dan aplikasi dalam praktik pelayanan kesehatan.* Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sutarto, S. (2017). *Peran kebijakan daerah dalam eliminasi malaria di Indonesia.* Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 6(4), 201-212.
- UNDP. (2022). *Strengthening malaria elimination and health system resilience in Timor-Leste.* Dili: UNDP Timor-Leste.
- Weraman, P., & Seuk, J. (2024). *Analisis faktor lingkungan terhadap kejadian malaria di Kabupaten Malaka.* Jurnal Ilmu Kesehatan Lingkungan, 15(1), 33-42.
- Wilson, M. L., & Krogstad, D. J. (2020). *Challenges in malaria control and elimination.* Annual Review of Public Health, 41, 411-431. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040119-094317>
- World Health Organization. (2015). *World malaria report 2015.* Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. (2021). *Global technical strategy for malaria 2016-2030: Update 2021.* Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2022). *World malaria report 2022.* Geneva: WHO.
- Yuliani, L., & Hidayat, A. (2023). *Persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan program eliminasi malaria di daerah perbatasan.* Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Indonesia, 12(2), 95-107.
- Yuliana, N., & Lestari, H. (2021). *Keterlibatan masyarakat dalam keberhasilan program eliminasi malaria di daerah endemis.* Jurnal Kesmas Nasional, 16(2), 101-112.
- Zhang, S., Zhou, S., & Wang, J. (2020). *Community engagement and malaria elimination: Lessons from Southeast Asia.* Malaria Journal, 19(1), 402. <https://doi.org/10.1186/s12936-020-03462-7>
- Zohra, A. (2019). *Mengenal parasit malaria dan siklus hidupnya.* Jurnal Parasitologi Indonesia, 22(1), 12-18.